

ANALISIS FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

by Woro Utari

Submission date: 23-Jul-2021 03:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 1623050972

File name: Jurnal_Neo_Bis_Vol_2_No_1,_Juli_2008.pdf (152.46K)

Word count: 3923

Character count: 25076

1 ANALISIS FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Woro Utari*

ABSTRACT

The research was based on reality that gross national product is very important for supporting the economic growth rate. This research aimed to test and analyze the effect of macro economic fundamental to value added taxes.

The research type was an explanatory research, in nature that is a research method aim to describe the effect or relationship among several variables, that were inflation, investment, interest rate, kurs, value added tax. The secondary and primary data were used. In analysis effect of each variables and analysis methode was used SPSS 11.

The result shown that simultaneous inflation, investment, interest rate and kurs were affected significantly to value added tax and the partially all variable not significantly to value added tax..

Keyword : Macro Economic Fundamental and Value added Tax effect

*Dosen Program Pascasarjana Univ. Wijaya Putra, Surabaya

Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini tentu saja merupakan dampak dari perkembangan perekonomian yang dilakukan di semua sektor. Tidak hanya pembangunan fisik saja, akan tetapi pembangunan non fisik juga senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Banyaknya anggaran yang harus dikeluarkan mendorong Pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatan negara secara lebih intensif. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi Pemerintah tidak

hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijakan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian.

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu komoditi, dan dipungut pada setiap tahapan produksi, PPn BM adalah pajak yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. PPN hanya mempunyai satu macam tarif untuk berbagai kelompok komoditi, dengan demikian maka pembagian beban pajak akan lebih merata karena setiap produk yang dijual dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama.

Dalam RAPBN 2003, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp.260.8 Triliun agar mampu menutupi 73,7 % dari anggaran belanja negara. Anggaran pajak itu naik 15,7 % dari target pajak APBN 2002 Rp.219,6 triliun.

Peningkatan penerimaan PPN dan PPn BM dalam negeri antara lain ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat perubahan harga umum terhadap nilai obyek PPN dan PPn BM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diartikan sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang diperlukan fundamental ekonomi yang kuat.

Indeks daya saing pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut laporan tingkat daya saing global (*Global Competiveness Report 2003-2004*) yang dikeluarkan sangat rendah diukur dengan tiga pilar indikator: lingkungan ekonomi makro, kualitas institusi publik dan teknologi.

Salah satu pokok persoalan adalah beratnya krisis yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, karena lemahnya fundamental makro ekonomi yang dapat dilihat pada menurunnya efisiensi pengelolaan dunia usaha dalam beberapa tahun terakhir.

Kelemahan fundamental makro ekonomi juga tercermin pada kerentanan (*fragility*) yang terdapat di dalam sektor keuangan, khususnya perbankan. Belum kuatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam berusaha mengakibatkan kegiatan usaha swasta cenderung kurang efisien dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat. Selain itu,

buruknya pengelolaan dunia usaha juga terkait dengan belum adanya perangkat hukum yang efektif, terutama dalam penyelesaian kepailitan usaha.

Kita sadari bahwa kegagalan dalam pengelolaan makro ekonomi dan moneter memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Oleh sebab itu, stabilitas makro ekonomi dan moneter harus menjadi fokus dalam proses pemulihan ekonomi. Ada banyak ragam instrumen kebijakan yang bisa digunakan oleh suatu negara dalam upaya meraih tujuan makro ekonomi.

Pertama kebijakan fiskal yang meliputi belanja negara dan perpajakan, belanja negara akan mempengaruhi besarnya konsumsi secara total, sedangkan perpajakan akan mengurangi penghasilan, penanaman modal dan output potensial. Kebijakan pemerintah di sektor pajak besar pengaruhnya terhadap investasi sektor riil. Tarif pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba yang akan diperoleh investor.

Kedua kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral menentukan jumlah uang beredar. Perubahan jumlah uang beredar akan menaikkan atau menurunkan suku bunga, serta mempengaruhi jumlah pengeluaran untuk barang-barang modal. Kebijakan moneter berperan penting baik terhadap GDP aktual maupun GDP potensial.

Ketiga kebijakan ekonomi luar negeri seperti intervensi atas nilai kurs devisa, kebijakan perdagangan ataupun kebijakan fiskal dan moneter dipergunakan untuk menjaga keseimbangan pasar valuta asing

Keempat kebijakan pendapatan (*income policy*) merupakan usaha pemerintah untuk secara langsung mempengaruhi kecenderungan upah dan harga guna menekan laju inflasi. Inflasi yang tinggi akan mempengaruhi produksi ekspor maupun impor. Turunnya impor menyebabkan produksi menurun terutama hasil-hasil produksi dari industri yang menggunakan bahan baku impor yang akhirnya juga akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis ingin mengkaji masalah - masalah yang berhubungan dengan faktor fundamental ekonomi makro GDP, inflasi, investasi, suku bunga, kurs/nilai tukar yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Jawa Timur.

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan pokok penelitian adalah :

- (1). Bagaimana variabel - variabel GDP (X_1), Inflasi (X_2), Investasi (X_3), Suku bunga (X_4) dan Kurs (X_5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Jawa Timur ?
- (2). Apakah terdapat variabel-variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur. Diantara variabel GDP, Inflasi, Investasi, Suku bunga, dan Kurs, variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk menguji pengaruh faktor-faktor GDP (X_1), Inflasi (X_2), Investasi (X_3), Suku bunga (X_4), Kurs (X_5), terhadap penerimaan PPN (Y) di Jawa Timur. (2) Untuk menganalisis faktor mana yang berpengaruh dominan dari faktor GDP, Inflasi, Investasi, Suku bunga dan Kurs, terhadap Pemerintah PPN di Jawa Timur.

Landasan Teori

Fundamental Ekonomi Makro

Laju pertumbuhan GDP yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran negara yang semakin meningkat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di lain pihak dengan peningkatan GDP berarti meningkatkan daya beli masyarakat, dipandang oleh perusahaan sebagai peluang pengembangan usahanya yang berarti peluang untuk meningkatkan laba perusahaan yang berdampak pula pada peningkatan penerimaan pajak.

Salah satu penyakit makro jangka pendek adalah inflasi yang mana hal tersebut merupakan peristiwa moneter yang sangat penting dan hampir dijumpai di semua negara di dunia. Definisi inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk menaik secara umum dan terus-menerus atau suatu keadaan dimana terjadi senantiasa turunnya nilai uang (Budiono, 1980 : 161).

Adanya syarat, adanya kecenderungan menaik yang terus-menerus juga perlu diperhatikan bahwa kenaikan harga-harga karena menjelang hari besar, hari

raya, atau yang terjadi sekali saja tidak dapat disebut sebagai inflasi dan kenaikan harga semacam itu tidak dianggap sebagai masalah atau penyakit ekonomi.

Nopirin (1995 :25) mendefinisikan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu.

Beberapa pendapat memberikan definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman definisi tersebut terjadi karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian, namun pada prinsipnya " inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin merosotnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara".

Apabila anggaran suatu negara mengalami defisit, artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, sehingga untuk menutupi pengeluarannya itu dengan mengeluarkan uang baru, maka juga akan timbul inflasi. **Menurut Manulang (1980 : 85)** inflasi yang sesungguhnya tidak akan terjadi apabila ketiga sektor tersebut saling imbang mengimbangi. Mengatasi inflasi adalah suatu sasaran utama kebijaksanaan ekonomi makro. Inflasi yang tidak seimbang mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, dan suku bunga riil pendapatan masyarakat terganggu.

Investasi

Investasi adalah suatu tindakan melepaskan uang, modal atau dana pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Hal ini senada dengan pendapat Husnan bahwa " Investasi adalah dengan maksud untuk memperoleh penghasilan" setiap penggunaan uang **(Husnan, 1998:11)**.

Pengertian lain dari "Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu " **(Hartono ,2000:5)**.

Sebelum melakukan investasi terlebih dahulu investor harus mempertimbangkan dua faktor, yakni rendahnya resiko non ekonomi dan tingginya potensi keuntungan. serta strategi investasi **(Sharpe, 1997:10)**.

Keputusan-keputusan pemerintah akan mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi baik pengaruh positif maupun negatif, demikian

pula kebijakan moneter akan berdampak langsung atas keputusan dan kelangsungan investasi.

Suku bunga

Suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan inflasi.

Suku bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang risikonya lebih besar jika menanamkan uang di bank terutama dalam bentuk deposito.

Suku bunga yang tinggi menyedot uang yang beredar di masyarakat. Namun di sisi lain, tingginya suku bunga akan meningkatkan nilai uang selain menyebabkan *opportunity cost* pada sektor industri atau sektor riil.

Suku bunga umumnya meningkat selama periode inflasi, yang merefleksikan kenyataan bahwa daya beli uang menurun karena harga-harga meningkat. Untuk menghitung pendapatan bunga dalam bentuk barang-barang dan jasa-jasa riil, kita menggunakan suku bunga riil, yang sama dengan suku bunga uang atau nominal dikurangi laju inflasi.

Kurs / nilai tukar.

Untuk mengukur harga barang dan jasa diperlukan mata uang yang berbeda antara negara-negara. Selain sebagai alat tukar, penilai dan alat penyimpanan, juga sebagai alat ekspor, maupun impor.

Kurs adalah merupakan paritas daya beli mata uang rupiah dibandingkan dengan mata uang, standar moneter internasional yaitu US dolar (**Moffet, 1995:92**). Menurut **Krugman (1996:41)** "Kurs memainkan peranan sentral dalam perdagangan internasional, karena kurs memungkinkan kita untuk membandingkan harga segenap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara lain".

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis, bahwa antara pemikul beban pajak

(destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

Sistem pajak ini diberlakukan untuk menggantikan sistem pajak penjualan (PPn), yang dirasa sudah tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dana bagi pembangunan.

Dibandingkan dengan PPh, maka PPN memang lebih menyeluruh dan lebih sederhana. Hampir seluruh jenis barang dan jasa pada setiap tingkatan produksi dikenakan PPN.

Konsep-konsep Dasar PPN

PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu komoditi. Nilai tambah suatu jenis komoditi dapat dihitung melalui dua pendekatan. Pertama dihitung melalui selisih antara nilai suatu komoditi dengan nilai masukan-antara yang digunakan untuk menghasilkan komoditi tersebut. Kedua, nilai tambah dapat juga dihitung melalui penjumlahan dari seluruh nilai masukan primer yang digunakan untuk menghasilkan suatu komoditi. Sistem PPN di Indonesia mendasarkan perhitungan nilai tambah pada selisih antara nilai suatu komoditi dengan nilai masukan-antara yang digunakannya.

PPN dipungut pada setiap tahapan produksi, oleh karena itu pajak ini disebut juga pajak pada berbagai tahapan produksi (*multistage tax*).

Konsep Makro Ekonomi

Laju pertumbuhan PDB adalah salah satu indikator utama ekonomi makro yang sering digunakan dalam menganalisis kinerja sebuah negara. Indikator tersebut mencerminkan potensi pasar di dalam negeri dan proses pembangunan ekonomi dari negara tersebut, terutama sangat penting bagi investor asing, negara donor dan lembaga keuangan internasional. Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari produktivitas kerja penduduknya. Adapun produktivitas sendiri harus didukung oleh tingkat investasi dan sumberdaya manusia yang memadai. Disamping produktivitas yang tinggi, agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh dengan pesat harus didukung adanya efisiensi dalam proses produksinya sehingga memungkinkan bagi perekonomian tersebut untuk memproduksi lebih maksimal.

Cara standar untuk mengukur kinerja perekonomian adalah dengan mengukur gross domestic product. (GDP), yaitu nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun. (**McEachern , 2000,101**).

Laju pertumbuhan GDP yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran negara yang semakin meningkat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan GDP berarti meningkatkan daya beli masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat mengakibatkan naiknya penerimaan pajak yaitu PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut.

Pertumbuhan perekonomian tergantung produktivitas tenaga kerja dan jumlah orang yang dipekerjakan. Perekonomian dapat tumbuh dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau meningkatkan employment atau keduanya.

Jika employment tumbuh lebih cepat daripada populasi secara keseluruhan output per kapita akan naik lebih cepat daripada produktivitas per pekerja (**Me. Eachern , 2000 :118**).

Variabel Fundamental Ekonomi Makro

Variabel Penelitian

Variabel Terikat (Y)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Jawa Timur. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha ;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Pemanfaatan .iasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.,

Di Daerah Jawa Timur dikurangi pengecualian yang bukan menjadi obyek penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-undang PPN tahun 2000.

Variabel Bebas (X) : GDP, Inflasi, Investasi, Suku bunga, Nilai tukar atau kurs
Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur dan fundamental ekonomi makro dari laporan Bank Indonesia serta Biro pusat Statistik, dalam kurun waktu April 1998 hingga Desember 2001.

Sampel penelitian berdasarkan Unit Analisis data dari masing-masing kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jawa Timur mulai April 1998 sampai Desember 2001 dan pengambilan sampel diperhitungkan bulanan sehingga akan mendapatkan n = 45.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengutip berbagai dokumen berupa laporan GDP, Laju inflasi, Perkembangan Investasi, Perkembangan suku bunga, Perkembangan Nilai tukar /Kurs dan Laporan Penerimaan Pajak yang diterbitkan oleh BPS , Bank Indonesia serta Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur serta sumber lain yang menunjang kemudian merekapitulasi sesuai dengan kebutuhan.

Teknik Analisis Data

Model regresi yang variabel terikatnya merupakan fungsi linier dari dua atau lebih variabel bebas disebut regresi linier berganda.

Adapun rumus regresi linier berganda tersebut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_iX_i + E$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai B_0 = konstanta

b_1, b_2, \dots, b_i = koefisien regresi E = error

X_1 = GDP, X_2 = inflasi, X_3 = investasi, X_4 = suku bunga, X_5 = nilai tukar / kurs

Hasil penelitian

Analisis Diskriptif.

Permasalahan pokok penelitian ini menyangkut beberapa variabel fundamental ekonomi, yaitu GDP (X_1), inflasi (X_2), Investasi (X_3), Suku bunga (X_4), kurs (X_5), dan penerimaan PPN di Jawa Timur (Y). Hasil analisis diskriptif adalah sebagai berikut

Data GDP dengan nilai statistik rerata (mean) adalah 32624967 dan nilai statistik simpangan bakunya (Standar Deviasi) adalah 1344344.1785 dengan $N = 45$.

Data Inflasi dengan nilai statistik rerata adalah 1.7017 dan nilai statistik simpangan bakunya adalah 2.38144 dan $N = 45$. Data Investasi dengan nilai statistik rerata adalah 715739 dan nilai statistik simpangan bakunya adalah 496971.84319 dan nilai $N = 45$.

Data Suku bunga dengan nilai statistik rerata adalah 24.9351 dan nilai statistik simpangan bakunya adalah 14.21673 dan $N = 45$.

Analisis Penelitian Penerimaan PPN Jawa Timur

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa Faktor GDP (X_1), Inflasi (X_2), Investasi (X_3), Suku bunga (X_4), Kurs (X_5) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Jawa Timur.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji t, yang terlebih dulu digunakan uji F, yakni menguji pengaruh secara serentak dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat Y dengan derajat keyakinan $\alpha = 5\%$. Hasil dari uji F menunjukkan bahwa $f_{hitung} > f_{tabel} = 5.486 > 2.460$ dengan tingkat signifikasinya 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa faktor GDP, Inflasi, Investasi, Suku bunga, Kurs secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk menguji pengaruh variabel secara parsial digunakan regresi berganda dengan uji statistik t. Hasil Uji statistik t pada derajat keyakinan $\alpha = 5\%$ dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa Koefisien regresi dan nilai t dari masing-masing variabel yang diuji dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi untuk variabel GDP adalah sebesar 0,03783 dan nilai t sebesar 2,127 ($p = 0,040$). Hasil ini menunjukkan bahwa GDP mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur.
2. Koefisien regresi untuk variabel inflasi adalah sebesar -9360.488 dan nilai t sebesar -0.707 ($\text{Sig} = 0,484$). Kondisi ini menunjukkan bahwa laju inflasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.
3. Koefisien regresi untuk variabel investasi 0,07846 dan nilai t sebesar 1.554 ($\text{sig} = 0,128$). Hasil ini menunjukkan bahwa investasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.
4. Koefisien regresi untuk variabel suku bunga adalah sebesar -2582.377 dan nilai t sebesar -1.037 ($\text{sig} = 0,306$). Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh suku bunga terhadap penerimaan PPN tidak signifikan. Di samping itu, suku bunga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penerimaan PPN artinya semakin tinggi suku bunga maka akan semakin berkurang penerimaan PPN.
5. Koefisien regresi untuk variabel kurs adalah sebesar -4.403 dan nilai t sebesar -301 ($\text{sig} = 0,765$). Hasil ini menunjukkan bahwa kurs mempunyai pengaruh tidak signifikan (tidak berpengaruh) terhadap penerimaan PPN

Secara umum dapat dikatakan bahwa dari variabel fundamental makro yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN adalah GDP sedangkan variabel lain seperti inflasi, investasi, suku bunga, kurs tidak berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel GDP mempunyai koefisien beta paling tinggi yaitu 0,322. Nilai statistik ini mempunyai makna bahwa GDP memiliki pengaruh dominan terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur.

Pembahasan

Data penelitian ini diestimasi dengan menggunakan OLS (*ordinary least square*), oleh karena itu, syarat untuk mendapatkan Blue (*Best linear*

unbiased estimator) harus dipenuhi. Ada beberapa cara uji yang dilakukan untuk mengetahui dipenuhinya syarat-syarat tersebut.

Setelah dilakukan uji asumsi Mask data dianalisis menggunakan regresi berganda (*multiple regression*),

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel GDP signifikan secara statistik pada $\alpha < 5\%$, sedangkan variabel lainnya yaitu inflasi, investasi, suku bunga dan kurs tidak signifikan secara statistik.

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut $Y = -715461.51 + 0,03783 X_1 - 9360.488X_2 + 0,07846X_3 - 2582.377X_4 - 4.403X_5$.

Dari persamaan di atas dapat digunakan untuk mendeteksi masing-masing koefisien dan konstanta. Nilai konstanta = -715461.5 artinya apabila variabel bebas sama dengan nol, maka variabel terikat diharapkan sebesar - 715461.5

Variabel GDP (X_1) mempunyai pengaruh positif dengan penerimaan PPN (Y), apabila variabel bebas lainnya tetap, maka setiap kenaikan GDP sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan penerimaan PPN sebesar 0,03783 satuan. Koefisien regresi dari variabel GDP menunjukkan tanda positif, hal ini berarti relevan dengan teori yang ada bahwa peningkatan GDP berarti mencerminkan kemakmuran negara yang semakin meningkat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan pajak konsumsi yaitu PPN.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Harry Yusuf A Laksana dan Budi Cristiadi (2002), Raditya Sukmana, MA (2003) yaitu bahwa GDP dapat dipakai sebagai alat estimasi potensi tingkat penerimaan pajak. Variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif dengan tingkat penerimaan PPN (Y), jika variabel bebas lainnya tetap, maka setiap kenaikan inflasi sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan penerimaan PPN sebesar - 9360.488 satuan.

Variabel inflasi menunjukkan tanda negatif, hal ini berarti secara teori adalah benar. Jika terjadi inflasi maka harga-harga akan naik, naiknya harga akan menyebabkan kenaikan harga pokok produksi yang dikeluarkan tinggi (*high cost economy*), berakibat naiknya harga jual. Inflasi dalam jangka pendek dalam batas normal sangat diperlukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, namun

dalam jangka panjang dengan tingkat inflasi yang melebihi 2 (dua) digit akan sangat mengganggu jalannya perekonomian , akan terjadi resesi ekonomi , banyak pengangguran , harga barang dan jasa semakin meningkat sehingga akan mengurangi permintaan masyarakat berarti semakin merosotnya daya beli dan berakibat turunnya penerimaan pajak konsumsi (PPN).

Hasil study ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel inflasi sebagai alat estimasi tingkat penerimaan PPN tidak dapat diterapkan karena tidak signifikan.

Hal ini berarti bahwa setiap perubahan kenaikan investasi sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan penerimaan PPN sebesar 0.07846 satuan apabila variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Koefisien variabel investasi bertanda positif ini berarti sesuai dengan teori bahwa perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya berakibat juga pada output dan kesempatan kerja selain itu investasi mendorong terjadinya akumulasi modal.

Penambahan stok bangunan gedung dan peralatan penting lainnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang , dan meningkatkan output potensial, pertumbuhan ekonomi akan berakibat kesejahteraan masyarakat meningkat serta naiknya penerimaan pajak. Sebaliknya apabila pajak perseroan dinaikkan, maka permintaan akan investasi menurun hal ini disebabkan karena pajak akan mempengaruhi laba usaha. Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil pengembalian investasi yang dipengaruhi oleh biaya investasi yang antara lain ditentukan oleh tingkat suku bunga dan pajak.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel investasi sebagai alat estimasi penerimaan PPN tidak dapat diterapkan, karena tidak signifikan.

Variabel suku bunga mempunyai pengaruh negatif dengan penerimaan PPN. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan kenaikan suku bunga sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan penerimaan PPN. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga sebagai alat estimasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat diterapkan. Disisi lain akan menurunkan minat investor berinvestasi di sektor riil karena harga pokok produksi menjadi meningkat dan akan melumpuhkan sektor produksi dan industri, akibatnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berakibat pula akan menurunnya penerimaan pajak.

Variabel kurs /nilai tukar mempunyai pengaruh negatif dengan penerimaan PPN. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap perubahan nilai tukar sebesar satu satuan akan mengakibatkan turunnya penerimaan PPN.

Variabel nilai tukar menunjukkan tanda negatif, ini berarti sesuai dengan teori bahwa bagi perusahaan yang berorientasi ekspor, depresiasi terhadap nilai mata uang di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi akan memberikan pengaruh yang menguntungkan bag] perusahaan, hal ini karena kemampuan bersaing produknya di pasar internasional meningkat, sehingga ekspor akan meningkat. Namun karena ekspor tariff PPN nya 0 % , maka tidak ada pengaruhnya terhadap penerimaan PPN.

Sebaliknya bagi perusahaan yang bahan bakunya dari impor akan mengalami kerugian , karena depresiasi tersebut akan meningkatkan biaya produksi, ini berarti laba perusahaan akan menurun akibatnya kecenderungan untuk pengeluaran konsumsi menurun dan dampaknya turunnya penerimaan pajak atas konsumsi (PPN).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel kurs/nilai tukar tidak dapat dipakai sebagai alat estimasi penerimaan PPN.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan uji F menunjukkan bahwa variabel GDP, Inflasi, Investasi, Suku bunga dan kurs secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis dengan uji F yaitu $f_{hitung} > f_{tabel}$, $=5,486 > 2,460$. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.413 yang berarti bahwa 41.30 % PPN dipengaruhi oleh GDP, Inflasi, Investasi, Suku Bunga dan Kurs. Sisanya sebesar 58.7 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian termasuk didalamnya adalah faktor politik dan kebijakan pemerintah.
2. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh variabel GDP adalah dominan terhadap penerimaan PPN . Hasil pengujian dengan uji t yaitu $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.127 > 1.684$ dan nilai beta paling tinggi yaitu sebesar 0,322 artinya variabel ini dapat digunakan untuk memprediksi secara berarti

penerimaan PPN di wilayah Jawa Timur, ⁴ sedangkan variabel inflasi, investasi, suku bunga dan kurs tidak signifikan terhadap penerimaan PPN artinya bahwa variabel-variabel tersebut tidak cukup berarti untuk memprediksi penerimaan PPN.

3. Pengaruh GDP terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur positif artinya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur berpengaruh searah dengan kenaikan penerimaan PPN semakin baik pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat penerimaan PPN. Hal ini tercermin dari pertumbuhan GDP dari tahun 1998 - 2001 yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan PPN, sedangkan pengaruh inflasi, investasi, suku bunga dan kurs relatif kecil karena variabel-variabel tersebut merupakan komponen yang saling terkait dengan GDP.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Abdullah, Burhanuddin.(2003). Teori Kebijakan Moneter dan Perundnagan dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Makalah yang tidak dipublikasikan
- Boediono, DR. (1985). Fkonorni Alone ter. BPFE. Yogyakarta.
- Brotodiharjo, R.S, S.H. (1986). Pengantar Ilmu Hukum Pajak PT. Eresco. Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan Manajemen YKPN : Yogyakarta
- Lipsey,Courant, Purvis, Steiner. (1997). Pengantar Makro Ekonomi Edisi kesepuluh. Binarupa Aksara: Jakarta
- Manullang, M, Drs. (1983). 1:'konomi tiloneter. Gha(ia Indonesia. Jakarta.
- Samuelson dan Nordhaus (Terjemahan oleh Haris Munandar, Freddy Saragih, Rudi Tambunan). (1997). Macro Economics (Makro Ekonomi), keempat belas, Jakarta.
- Soemitro Rochmat, SH, Prof. Dr.(1986). A.cas dan Dasar Perpajakan I. Ewfika Aditama : Bandung
- Sukardji Untung, (2001). Pajak Pertamahan Nilai. Fakultas Ekonomi Indonesia

Tambunan, Tulus, Dr. (1998). Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi.
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta

Gujarati Damodar, Sumarno Zain 1995, Ekonometrika (Edisi Bahasa Indonesia),
Erlangga, Jakarta.

ANALISIS FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	7%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
3	202.159.18.43 Internet Source	3%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	3%
5	carceres-carceres.blogspot.com Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On